

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN DI SDN 2 SOKARAJA TENGAH

Mifta Awaliyah Sarino¹, Ariesta Amanda², Indah Ayu Permana Pribadi³, Chamid Sutikno⁴, Zaula Rizqi Atika⁵

miftaawaliyahsarino.kuliah@gmail.com¹, ariestaamanda92@gmail.com²,
iap.pribadi@unupurwokerto.ac.id³, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id⁴,
zr.atika@unupurwokerto.ac.id⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 indikator: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; sikap para pelaksana; dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian pada indikator standar dan sasaran kebijakan; sumber daya sub aspek SDM; karakteristik organisasi pelaksana sub aspek struktur organisasi dan pola hubungan yang terjalin antar organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dna kegiatan-kegiatan pelaksanaan; sikap para pelaksana; dan lingkungan sosial serta politik yang mendukung implementasi kebijakan. Sementara pada indikator sumber daya sub aspek anggaran dan karakteristik organisasi pelaksana sub aspek fleksibilitas organisasi tercapai cukup baik. Kemudian pada indikator lingkungan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Kurikulum Merdeka, Mapel PJOK.

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Merdeka Curriculum policy in Physical Education, Sports and Health subjects at SDN 2 Sokaraja Tengah. The method used in this research is descriptive qualitative and the selection of informants is carried out using Purposive Sampling technique. The data sources in this study consist of primary and secondary data obtained through interviews, observation and documentation. The focus in this study is in accordance with Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory which has 6 indicators: policy standards and objectives; resources; characteristics of the implementing organization; communication between related organizations and implementation activities; attitudes of implementers; and the social, economic, and political environment. The results showed that the implementation of the Merdeka Curriculum policy in Physical Education, Sports and Health subjects at SDN 2 Sokaraja Tengah has gone well. his can be seen from the achievement of indicators of policy standards and objectives; resources sub-aspects of human resources; characteristics of implementing organizations sub-aspects of organizational structure and patterns of relationships that exist between implementing organizations; communication between related organizations and implementation activities; attitudes of implementers; and the social and political environment that supports policy implementation. While the resource indicators of the budget sub-aspects and the characteristics of the implementing organization sub-aspects of organizational flexibility are quite well achieved. Then the economic environment indicator does not have an influence on the implementation of the

Merdeka Curriculum policy in Physical Education, Sports and Health subjects at SDN 2 Sokaraja Tengah.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Merdeka Curriculum, Physical Education, Sports And Health Subjects.*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik, oleh karena itu suatu program harus dilaksanakan agar dapat memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan (Situmorang, 2016). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebelum adanya suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada berbagai bidang yang menjadi bagian dari kebijakan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, seni, budaya, dan bidang lainnya. Kebijakan di bidang pendidikan ditetapkan guna meningkatkan kualitas dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat menetapkan kebijakan yang mencakup berbagai hal, seperti kurikulum, metode pengajaran, pengembangan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan dan evaluasi, dan masih banyak lagi (Dwi et al., 2024).

Di Indonesia pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada kurikulum sebagai dasar dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun dalam perjalanannya, kurikulum di Indonesia terus mengalami pergantian guna meningkatkan kualitas pendidikan (Putri & Rezania, 2023). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya untuk mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu masif dalam bidang pendidikan (Angga et al., 2022). Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia pertama kali dilakukan memakai kurikulum 1947 (Sari et al., 2023). Berikut perubahan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa:

Tabel 1 Kurikulum di Indonesia dari masa ke masa

Nama Kurikulum	Karakteristik
Kurikulum 1947	Dikenal dengan Rentjana Pelajaran 1947, bersifat politisi, tidak berfokus pada pendidikan pikiran namun mengutamakan pendidikan karakter untuk membangun rasa nasionalisme (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1952	Disebut dengan Rentjana Pelajaran Terurai, kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional yang paling menonjol adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dalam silabus mata pelajarannya tercantum secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1964	Disebut Rencana Pendidikan 1964, Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik/artistik, keterampilan dan jasmani (Alhamuddin, 2014).

Kurikulum 1968	Menggantikan kurikulum sebelumnya dan memiliki fokus lebih berorientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1975	Memiliki beberapa prinsip pelaksanaan yaitu: 1) Pendidikan harus berorientasi pada tujuan. 2) Menggunakan pendekatan integratif agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integrative, 3) Lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas, 4) Menganut pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), 5) Stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum 1984	Dalam kurikulum ini siswa ditempatkan sebagai objek. Mengutamakan proses dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum 1994	Terjadi perubahan sistem semester menjadi sistem catur wulan dengan tujuan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak (Setiyorini & Setiawan, 2023). Namun justru memberikan beban belajar yang terlalu berat bagi siswa karena terdapat muatan nasional dan muatan lokal ditambah dengan tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1999	Disebut Suplemen Kurikulum 1999, perubahan dari kurikulum sebelumnya hanya menambah sejumlah materi pelajaran saja (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2004	Disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (<i>learning outcomes</i>) dan keberagaman (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2006	Disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian sekolah yaitu guru bertugas mengembangkannya dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah serta daerahnya. Hasil dari seluruh pengembangannya disusun menjadi KTSP dibawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan di wilayah terkait (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2013	Kurikulum ini berbasis kompetensi dengan fokus pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik (Alhamuddin, 2014). Lebih menekankan pada pendidikan karakter, dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter banyak (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum Darurat	Kurikulum ini hadir pada saat pandemi Covid-19, dimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara <i>hybrid</i> . Kemudian terdapat penyederhanaan kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 di setiap mata pelajaran, hal ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya (Kemendikbud, 2020).

Kurikulum Merdeka	Kurikulum ini hadir sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19 dengan kerangka yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Setiyorini & Setiawan, 2023).
-------------------	--

Sumber: Olah Data Penulis

Dari data di atas dapat dipahami bahwa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini terjadi sebanyak 13 kali. Hal ini tentunya dilakukan guna menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Saat ini terdapat tiga jenis kurikulum yang dapat dipilih oleh sekolah sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka (Mulyasa, 2023).

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 dijelaskan bahwa, Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 73% dari seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia (Mashabi & Kasih, 2024). Dalam Peta Sebaran Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), terdapat 369.875 satuan pendidikan yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka dan pada tingkat SD/ sederajat sudah mencapai 145.785. Kemudian presentase pelaksana IKM di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 98%.

Tabel 2
Data Daerah Pelaksana Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Semarang	5.559
2	Kabupaten Cilacap	2.268
3	Kabupaten Banyumas	2.228
4	Kabupaten Brebes	2.221
5	Kabupaten Kebumen	2.149

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Data di atas merupakan 5 daerah pelaksana IKM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data, Kota Semarang menjadi pelaksana IKM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 5.559 satuan pendidikan. Kemudian peringkat kedua berada di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pelaksana 2.268 satuan pendidikan dan Kabupaten Banyumas menempati peringkat ketiga dengan jumlah pelaksana 2.228 satuan pendidikan.

Tabel 1.3
Data Sebaran Sekolah Dasar/Sederajat Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di
Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Ajibarang	33	2	35
2	Banyumas	31	3	34
3	Baturaden	24	2	26
4	Cilongok	43	2	45
5	Gumelar	32	0	32
6	Jatilawang	36	0	36
7	Kalibagor	21	2	23
8	Karanglewas	21	0	21
9	Kebasen	28	0	28
10	Kedung Banteng	26	3	29
11	Kembaran	29	2	31
12	Kemranjen	33	0	33
13	Lumbir	34	0	34
14	Patikraja	27	0	27
15	Pekuncen	34	1	35
16	Purwojati	20	0	20
17	Purwokerto Barat	18	4	22
18	Purwokerto Selatan	21	6	27
19	Purwokerto Timur	20	11	31
20	Purwokerto Utara	20	2	22
21	Rawalo	22	1	23
22	Sokaraja	30	6	36
23	Somagede	19	0	19
24	Sumbang	37	1	38
25	Sumpiuh	30	0	30
26	Tambak	27	1	28
27	Wangon	45	1	46
TOTAL		761	50	811

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Berdasarkan data tersebut, sekolah dasar pelaksana IKM berjumlah 811 yang tersebar di 27 kecamatan, terdapat 761 sekolah dasar negeri dan 50 sekolah dasar swasta. Namun berdasarkan Portal Data Kemendikbudristek, jumlah satuan pendidikan dasar yang aktif baik negeri maupun swasta di Kabupaten Banyumas adalah 1.012. Dengan demikian, ada 201 satuan pendidikan dasar yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.

Tabel 4
Data Nama Sekolah Dasar/Sederajat Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di
Kecamatan Sokaraja

No	Nama Satuan Pendidikan	Kelurahan/Desa	Status
1	SDN 1 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
2	SDN 2 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
3	SDN Banjarsari Kidul	Banjarsari Kidul	Negeri
4	SD Al- Falah Banjarsari Kidul Sokaraja	Banjarsari Kidul	Swasta
5	SDN Jompo Kulon	Jompo Kulon	Negeri
6	Sdn Kalikidang	Kalikidang	Negeri

7	SDN 1 Karangduren	Karangduren	Negeri
8	SDN 2 Karangduren	Karangduren	Negeri
9	SDN 1 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
10	SDN 2 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
11	SDN 3 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
12	SDN 1 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
13	SDN 2 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
14	SDN Karangrau	Karangrau	Negeri
15	SDN Kedondong	Kedondong	Negeri
16	SDN 2 Klahang	Klahang	Negeri
17	SDN 1 Klahang	Klahang	Negeri
18	SDN Lemberang	Lemberang	Negeri
19	SDN 2 Pamijen	Pamijen	Negeri
20	SDN 1 Pamijen	Pamijen	Negeri
21	SDN Sokaraja Kidul	Sokaraja Kidul	Negeri
22	SD Kristen Sokaraja	Sokaraja Kidul	Swasta
23	SDN 3 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
24	SDN 4 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
25	SDN 2 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
26	SDN 1 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
27	SD IT Annida Sokaraja	Sokaraja Kulon	Swasta
28	SDN Sokaraja Lor	Sokaraja Lor	Negeri
29	SDN 2 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
30	SDN 1 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
31	SD IT Top Kids	Sokaraja Tengah	Swasta
32	SD NU Master Sokaraja	Sokaraja Tengah	Swasta
33	SDN 2 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
34	SDN 1 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
35	SDN Wiradadi	Wiradadi	Negeri
36	SD IT Mutiara Ilmu	Wiradadi	Swasta

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Berdasarkan data di atas, maka dapat dipahami bahwa jumlah satuan pendidikan tingkat dasar pelaksana IKM di Kecamatan Sokaraja adalah 36 yang terdiri dari 30 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi salah satu sekolah dasar yang sudah terdaftar menerapkan IKM. Pada tahun 2023, SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi sekolah rujukan dalam pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP) yang diikuti oleh penulis selama empat bulan, mulai dari tanggal 14 Agustus-14 Desember 2023. AMSP merupakan salah satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selama melaksanakan Program AMSP penulis memiliki berbagai tugas untuk membantu Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM). Salah satunya menjadi guru Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) selama formasi guru tersebut kosong. Pada pertengahan bulan Oktober 2023 formasi guru Mapel PJOK telah diisi, namun penulis tetap diberi tugas untuk membantu selama proses KBM berlangsung. Hal ini dikarenakan terdapat dua kelas yang diampu dalam satu kali pembelajaran sehingga jumlah siswa yang mengikuti kelas dapat mencapai 60 siswa. Pada saat penulis melaksanakan Program AMSP terdapat tiga kelas yang sudah menerapkan IKM yaitu kelas 1, 2, dan 4.

Tabel 5

Jadwal Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di SDN 2 Sokaraja Tengah Kelas IKM Tahun 2023

No	Hari	Pukul	Kelas
1	Senin	07.00-09.00	4A dan 4B
2	Selasa	07.00-09.00	2A dan 2B
3	Rabu	07.00-09.00	1A dan 1B

Sumber: Olah Data Penulis

Tabel di atas merupakan jadwal Mapel PJOK untuk kelas 1, 2, dan 4. Setiap kelas terdiri dari dua rombel yaitu kelas A dan kelas B. Setiap hari, penulis mendampingi guru Mapel PJOK dalam pelaksanaan KBM terkadang penulis juga menggantikan guru terkait jika berhalangan untuk mengajar. Selama proses KBM terdapat tantangan dan hambatan yang muncul, seperti sarana pembelajaran yang kurang memadai maupun kondisi lapangan olahraga yang rusak. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena siswa di SDN 2 Sokaraja Tengah tetap bersemangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Mapel PJOK. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai yang diperoleh oleh siswa yaitu:

Tabel 6 Data Nilai Rata-Rata Siswa Kelas 5A dan 5B Mapel PJOK

Kelas	P1	P2	P3	P4	P5	SAS	Rata-Rata Nilai PJOK	KKM
5A	86	85	86	85	85	77	84	76
5B	88	88	88	88	88	79	86	76
Nilai Tertinggi Kelas 5A	89	89	89	89	89	86	88	-
Nilai Terendah Kelas 5A	76	76	76	76	76	76	76	-
Nilai Tertinggi Kelas 5B	89	89	89	89	89	94	90	-
Nilai Terendah Kelas 5B	79	80	79	80	79	76	79	-
Nilai Rata-Rata Kelas 5	87	87	87	87	87	78	85	-

Sumber: Olah Data Penulis (Dokumen Pra Survei)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tertinggi kelas 5A dan 5B dari pembelajaran 1-5 sudah melampaui KKM begitu juga pada nilai terendah sudah mencapai KKM yaitu 76. Kemudian nilai rata-rata siswa kelas 5 dari pembelajaran 1-5 adalah 87 dan nilai rata-rata Sumatif Akhir Semester adalah 85. Dengan demikian, seluruh siswa kelas 5 sudah dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Nilai.

Tujuan dari pembelajaran Mapel PJOK dalam Kurikulum Merdeka adalah menciptakan generasi sehat dan berakarakter Pancasila. Melalui pembelajaran PJOK siswa diharapkan dapat memahami bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani, menerapkan gaya hidup sehat dan memiliki karakter yang baik. Dalam pelaksanaannya aktivitas pembelajaran Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa, dimana guru menerapkan aktivitas olahraga melalui permainan yang melatih ketangkasan, kejujuran, penalaran, disiplin dan kolaborasi antar siswa. Melalui aktivitas ini maka dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan dari IKM sendiri.

Dengan adanya kondisi tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka

pada Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Dasar dari pelaksanaan IKM berpedoman pada Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Murdiyanto, 2020 penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan acara kuantifikasi lainnya. Keunggulan dari metode penelitian kualitatif adalah pembahasannya lebih mendalam dan terpusat karena data digali secara mendalam (Semiawan, 2010). Selain itu terbuka lebih dari satu pandangan karena berasal dari pandangan dan informasi beberapa narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif untuk dapat menjelaskan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Lokasi dari penelitian ini adalah SDN 2 Sokaraja Tengah.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling yang mana sampel diambil sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti (Semiawan, 2010). Sampel pada penelitian ini terdiri dari 8 informan yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman terhadap implementasi Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah, diantaranya Kepala Sekolah; Guru Mapel PJOK; siswa kelas 5; dan Ketua KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman (1984) yang memiliki tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sokaraja Tengah yang merupakan lembaga pendidikan formal terakreditasi A di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksana Kurikulum Prototipe sejak tahun 2020 yang dirubah menjadi IKM sejak tahun 2022. SDN 2 Sokaraja Tengah beralamat di Jalan Krida Mandala Nomor 17, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. SD Negeri 2 Sokaraja Tengah berdiri pada tanggal 08 Maret 1952, dengan luas tanah 4229 M2 dan luas bangunan 2.359 M2. Pada tahun 2025, kegiatan pembelajaran SDN 2 Sokaraja Tengah telah menggunakan Kurikulum Merdeka untuk seluruh kelas.

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Mata Peajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di SDN 2 Sokaraja Tengah

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan publik, yang mana merupakan proses pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun dalam kelompok yang dimaksudkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan (Majo, 2023). Tahap implementasi hanya akan berjalan ketika pemerintah sudah menetapkan peraturan dan mengalokasikan dana untuk membiayai implementasi kebijakan. Proses implementasi dilakukan dengan menggerakkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada agar tujuan

kebijakan dapat tercapai. Kurikulum menjadi salah satu produk kebijakan publik di bidang pendidikan yang terus mengalami perubahan dan perbaikan di Indonesia. Kurikulum merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Studi mengenai implementasi kurikulum dilakukan untuk mengukur sejauh mana program-program yang telah direncanakan terlaksana dan dapat meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia.

Pada saat pandemi Covid-19, Mendikbudristek meluncurkan Kurikulum Darurat sebagai bentuk respon menghadapi kondisi pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Dalam Kurikulum Darurat terdapat penyederhanaan pelajaran, tujuannya agar guru dan siswa lebih fokus untuk mendalami materi-materi esensial. Pasca pandemi, Kurikulum Darurat disempurnakan menjadi Kurikulum Merdeka dengan harapan dapat mendukung *learning loss recovery*. SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi salah satu sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Darurat yang kemudian diubah menjadi IKM pada tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, SDN 2 Sokaraja Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, susunan organisasi SD terdiri atas kepala sekolah; kelompok jabatan fungsional; dan kelompok jabatan pelaksana. Kemudian kelompok jabatan fungsional terdiri dari guru dan pustakawan. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, IKM memiliki prinsip utama yaitu:

- a. Pengembangan karakter, yaitu pengembangan potensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran;
- b. Fokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna;
- c. Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat

Prinsip IKM ini sejalan dengan visi dan misi SDN 2 Sokaraja Tengah, yaitu: “mewujudkan insan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter yang unggul dalam prestasi”. Kemudian misi SDN 2 Sokaraja Tengah adalah: 1) meningkatkan ketaqwaan dan keimanan siswa melalui pendidikan agama/keyakinan yang dianutnya; 2) melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) untuk mengembangkan potensi intelektual dan wawasan keilmuan siswa yang berbasis kompetensi; 3) meningkatkan keterampilan, bakat, minat dan budi pekerti siswa melalui berbagai kegiatan pelatihan, pengembangan diri maupun pembinaan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, 4) meningkatkan daya saing kemampuan siswa dalam mengolah pikir melalui kegiatan multimedia elektronik secara mandiri, 5) mengembangkan dan menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah melalui inovasi dan perkembangan IPTEK; 6) Meningkatkan rasa disiplin dan setia kawan serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara, bagi seluruh warga sekolah.

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam IKM. Tujuan Mapel PJOK adalah untuk menumbuhkan berkembang berbagai potensi siswa meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Juditya et al., 2022). Mapel PJOK menjadi penting bagi jenjang pendidikan dasar, karena dengan sehatnya jiwa dan raga maka dapat mendorong kemampuan siswa dalam

mengikuti mata pelajaran lainnya. Dalam IKM, Mapel PJOK ditujukan untuk membentuk generasi Indonesia yang sehat dan gembira melalui pemahaman bagaimana cara untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, Mapel PJOK juga memiliki misi pendidikan karakter melalui aktivitas pembelajaran yang melatih kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab, kolaborasi, dan empati.

Indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah menggunakan Model yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* yang didalamnya terdapat enam variabel, yaitu (Situmorang, 2016):

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya yang mendukung baik berupa sumber daya manusia maupun non manusia
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung implementasi kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator pertama adalah standar dan sasaran kebijakan yang mana untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh implementator, karena pada dasarnya kinerja kebijakan adalah penilaian atas ketercapaian dari standar dan sasaran yang telah ditetapkan (Fauziyah & Arif, 2021). Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah berpedoman pada peraturan yang berlaku, diantaranya Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang didalamnya termaktub pedoman pelaksanaan IKM untuk jenjang sekolah dasar. Kemudian sebelum melaksanakan IKM sekolah harus menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) terlebih dahulu. Dalam pengembangan KOSP mengacu pada visi dan misi sekolah serta karakteristik dari satuan pendidikan sendiri. Selanjutnya pengembangan KOSP juga mengacu pada 4 Standar Nasional Pendidikan yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan diatur dalam Permendikbudristek [No. 5 tahun 2022](#) tentang SKL pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa SKL merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan.
2. Standar Isi yang diatur oleh Permendikbudristek [No. 7 Tahun 2022](#) tentang Standar Isi pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses yang diatur dalam Permendikbudristek [No. 16 Tahun 2022](#) tentang Standar Proses pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar Penilaian Pendidikan diatur pada Permendikbudristek [No. 21 Tahun 2022](#) tentang Standar Penilaian pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan KOSP Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah dilakukan sesuai dengan yang ada di dalam regulasi, kemudian dibahas bersama dalam rapat Kelompok Kerja Guru Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja. Setelah dirumuskan, pelaksanaan KOSP dikembalikan kepada guru mapel untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sumberdaya yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki kebebasan untuk melakukan modifikasi sebuah permainan olahraga selama itu tidak keluar dari konsep materi. Dalam proses penerapannya, IKM pada Mapel PJOK dilaksanakan sesuai arahan dari pemerintah yaitu secara bertahap mulai dari kelas 1 dan 4, kemudian kelas 2 dan 5, serta yang terakhir adalah kelas 3 dan 6. Hal ini dikarenakan dalam IKM terdapat pembagian fase, dimana kelas 1 merupakan fase pertama yaitu fase A dan kelas 4 termasuk dalam fase kedua yaitu fase B. Kemudian dalam melaksanakan IKM Mapel PJOK, guru telah melaksanakan semua yang ada di KOSP dan jangkauan untuk siswa per tahun 2024 seluruhnya sudah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan seluruh kelas yang sudah menggunakan IKM dalam proses pembelajaran.

Target dari IKM Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah adalah siswa yang dituntut untuk aktif dalam sebuah pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Hasil dari proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat memiliki karakter dan moral yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan karakter dan moral siswa dalam pembelajaran Mapel PJOK dilakukan melalui aktivitas permainan yang melatih kejujuran, kedisiplinan, kolaborasi, kepedulian, dan rasa tanggungjawab. Pembentukan karakter siswa di sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pondasi agar saat siswa telah berada dalam jenjang pendidikan menengah mereka akan lebih mudah untuk diarahkan.

Berdasarkan hasil penjelasan, maka implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah pada indikator standar dan sasaran kebijakan sudah tercapai dengan baik. Pada sub aspek standar dan sasaran kebijakan yaitu adanya KOSP Kurikulum Merdeka, sekolah telah menyusun dan melaksanakan KOSP Kurikulum Merdeka Mapel PJOK sesuai dengan regulasi yang ada, Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Arif (2021) dengan Judul “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban”, yang mana dalam indikator standar kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena dalam pembangunan Jalan Lingkar Selatan belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil yang lebih baik karena pada sub aspek standar telah tercapai dengan baik.

Pada sub aspek ketercapaian standar dan sasaran kebijakan yaitu ketercapaian KOSP KM Mapel PJOK telah tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jangkauan KOSP KM Mapel PJOK terhadap siswa pada tahun 2024 seluruhnya sudah tercapai di SDN 2 Sokaraja Tengah. Target dari IKM sendiri adalah siswa dengan tujuan untuk membentuk karakter pada siswa juga telah diwujudkan pada aktivitas pembelajaran Mapel PJOK melalui variasi permainan yang melatih kejujuran, kedisiplinan, kolaborasi, kepedulian, dan rasa tanggungjawab. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Arif (2021), yang mana sasaran kebijakan sudah tercapai dengan baik, karena pembangunan Jalan Lingkar Selatan dapat meningkatkan aksesibilitas dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan demikian

kedua penelitian memberikan hasil yang sama-sama baik dalam sub aspek ketercapaian standar dan sasaran kebijakan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi kebijakan. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), mengidentifikasikan sumber daya kedalam dua jenis yaitu:

1. Sumber daya manusia

Manusia menjadi sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan, karena merupakan penggerak sumber daya lainnya. Dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah sumber daya manusianya adalah guru Mapel PJOK yang terdiri dari satu orang guru tetap yang dibantu oleh satu orang guru honorer. Jumlah guru ini telah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan jumlah siswa yang mana setiap kelas terdiri dari dua rombel. Dalam satu kali pembelajaran Mapel PJOK terdiri dari dua kelas yaitu A dan B dengan didampingi oleh dua orang guru. Memang terkadang guru mengalami kendala dalam mengarahkan siswa karena dalam satu kali pembelajaran terdapat sekitar 60 siswa yang diajar, namun guru masih bisa mengatasi hal tersebut dengan mengalihkan siswa melalui *game*. Selain itu dari siswa juga merasa bahwa guru PJOK yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah sudah cukup dan memiliki kemampuan yang baik saat mengajar.

Kemudian dari segi kompetensi, kedua guru Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah merupakan lulusan sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rohani, jadi bidang keilmuannya sudah sesuai dan selaras. Dari segi profesionalitas, guru EAP sudah mendapatkan sertifikasi guru dan lolos dari seleksi P3K, sehingga secara regulasi sudah layak dan memenuhi untuk mengajar Mapel PJOK. Sementara guru FAA yang merupakan guru honorer masih dalam proses menuju program pendidikan profesi guru.

Selanjutnya untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan dalam penerapan IKM, guru PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah sering mengikuti bimbingan teknis, *workshop*, dan seminar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maupun Kelompok Kerja Guru (KKG) Kecamatan Sokaraja. Selain itu pada awal penerapan IKM pemerintah mewajibkan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia termasuk guru Mapel PJOK untuk mengisi *Platform Merdeka Mengajar* (PMM). PMM merupakan *platform* edukasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan IKM. Di dalam PMM ini terdapat berbagai fitur yang dikelompokkan ke dalam belajar berkelanjutan, karir dan kinerja, inspirasi pembelajaran, dan dokumen rujukan.

Dalam fitur belajar berkelanjutan guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dan mengaksesnya secara mandiri, selain itu guru dapat berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan proses belajar mengajar melalui komunitas yang tersedia. Fitur karir dan kinerja digunakan sebagai pengelolaan kinerja guru, seleksi kepala sekolah, dan refleksi kompetensi. Dalam fitur inspirasi pembelajaran guru dapat mengisi atau mencari referensi terkait dengan pengembangan pembelajaran bisa melalui ide praktik maupun video inspirasi terpilih. Kemudian dalam fitur dokumen rujukan dimanfaatkan untuk mengelola pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Dalam praktiknya guru Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah memanfaatkan PMM ini dengan baik sebagai media untuk belajar, peningkatan kompetensi, dan referensi dalam pengembangan aktivitas pembelajaran. Setiap kali membutuhkan referensi dalam pengembangan aktivitas pembelajaran maka guru Mapel PJOK akan mengakses PMM untuk mencari video atau artikel mengenai praktik pembelajaran terpilih.

2. Sumber daya non manusia

Sumber daya non manusia merupakan segala sesuatu yang mendukung proses implementasi kebijakan publik selain sumber daya manusia, dalam penelitian ini sumber daya non manusia merupakan anggaran yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa sumber anggaran untuk pembiayaan dalam pelaksanaan IKM Mapel PJOK berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakrafan, pada pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di SDN 2 Sokaraja Tengah dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh operasional sekolah termasuk dalam pembelian alat-alat olahraga seperti bola voli, bola kasti, net dan kun yang mana mendukung kegiatan pembelajaran Mapel PJOK. Memang Dana BOS belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengadaan fasilitas pembelajaran Mapel PJOK, seperti perbaikan lapangan bola voli dengan maksimal dan pembuatan lapangan basket mengingat keterbatasan anggaran BOS itu sendiri yang digunakan untuk membiayai seluruh operasional sekolah. Namun dengan adanya hal tersebut tidak menjadi kendala yang begitu besar, karena guru dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan cara lain seperti memberikan video pembelajaran kemudian siswa menirukan di rumah atau membuat variasi dalam permainan olahraga bola voli dan basket. Dengan demikian aktivitas pembelajaran tetap bisa berjalan dan kendala bisa teratasi, ini adalah salah satu bentuk fleksibilitas dari IKM sendiri. Kemudian, sebenarnya sekolah telah mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik ke Dinas Pendidikan dan akan diterima oleh SDN 2 Sokaraja Tengah di bulan Juni mendatang. Namun DAK fisik ini baru ditujukan untuk memperbaiki bangunan gedung sebelah barat yang memang sudah tua dan lama tidak direnovasi. Selanjutnya sekolah akan tetap mengupayakan untuk memperbaiki lapangan bola voli secara maksimal dan rencananya akan tetap membuat lapangan basket, hal ini akan dilakukan secara bertahap.

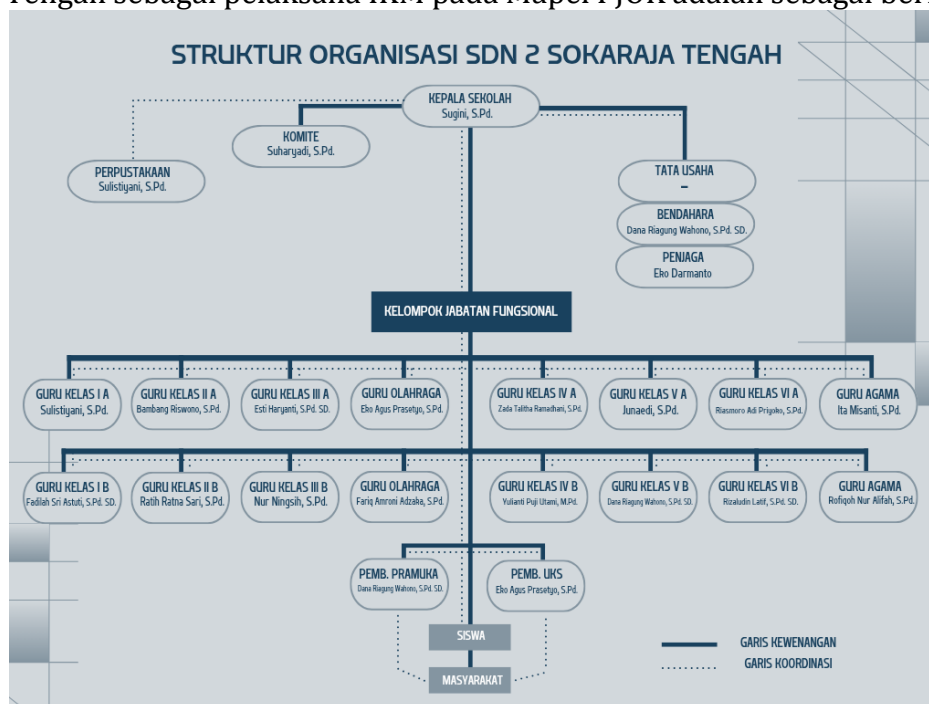
Berdasarkan hasil penelitian, maka sub aspek sumber daya manusia telah terpenuhi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jumlah guru mapel yang sudah cukup, memiliki kompetensi yang sesuai, memiliki sertifikasi keguruan dan telah mengikuti berbagai seminar, bimtek, maupun *workshop* untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar dan menerapkan IKM. Selain itu, guru juga sudah memanfaatkan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) dengan baik. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumitra (2023) dengan judul “Implementasi Kurikulum Belajar Mandiri Mata Pelajaran PJOK di Sekolah Dasar Kabupaten Beringin”, yang mana sumber daya manusia mendukung dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di Sekolah Dasar Kabupaten Beringin karena mampu memanfaatkan perangkat pendukung dengan baik. Kedua penelitian ini sama-sama telah menunjukkan hasil yang bagus karena pada sub aspek sumber daya manusia telah berhasil tercapai dengan baik.

Pada sub aspek anggaran telah mendukung meskipun belum sepenuhnya karena keterbatasan dana BOS yang digunakan untuk seluruh operasional sekolah, namun pihak sekolah tetap mengupayakan agar bisa sepenuhnya mendukung dengan cara melakukan perbaikan fasilitas secara bertahap atau melalui pengajuan DAK kepada

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al., (2024) dengan judul *Dinamika Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru Sekolah Dasar*, yang mana terdapat hambatan pada aspek anggaran karena keterbatasan BOS yang tidak memungkinkan beberapa kegiatan pembelajaran terakomodasi. Namun pihak sekolah masih bisa mengatasi dengan bekerjasama bersama wali murid saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Dengan demikian kedua penelitian menunjukkan bahwa sub aspek anggaran belum dapat sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, namun pihak sekolah masih tetap berupaya untuk mengatasi hal tersebut agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan maka perlu mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik dari implementator seperti struktur organisasi, fleksibilitas organisasi dan pola-pola hubungan yang terjalin. Semua ini akan saling mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya (Fauziyah & Arif, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi SDN 2 Sokaraja Tengah sebagai pelaksana IKM pada Mapel PJOK adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi SDN 2 Sokaraja Tengah

Sumber: SDN 2 Sokaraja Tengah, 2025

Gambar di atas menunjukkan bagaimana struktur organisasi di SDN 2 Sokaraja Tengah yang mana telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdiri dari kepala sekolah sebagai pimpinan yang bertanggungjawab atas segala pengelolaan dan pengembangan kegiatan di sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat kelompok jabatan pelaksana yaitu tata usaha, bendahara dan penjaga. Pada saat ini jabatan tata usaha belum diisi, hal ini karena guru yang bertugas sebagai tata usaha telah dimutasi dan belum ada pembentukan struktur organisasi yang baru. Selanjutnya terdapat jabatan fungsional yang terdiri dari perpustakaan, guru kelas 1-6, guru Mapel PJOK, guru

Mapel PAI, Pembina Pramuka dan Pembina UKS.

Dalam pelaksanaan IKM Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah, struktur organisasi bersifat *top down* yang mana garis kewenangan dan koordinasi berasal dari pimpinan dan telah dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah memiliki peran sebagai *educator* untuk membangun lingkungan belajar yang positif melalui pengembangan kurikulum termasuk di Mapel PJOK dan menjadi teladan bagi siswa dan tenaga pendidik dengan membangun moral serta mental mereka. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin telah menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk melaksanakan IKM sebaik mungkin. Kepala sekolah selalu memberikan arahan yang baik melalui diskusi maupun rapat dan terbuka akan berbagai saran dari para guru. Kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan pihak KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja melalui forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Setiap kali ada informasi dari KKG Mapel PJOK maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas akan selalu disampaikan kepada guru Mapel PJOK, seperti informasi mengenai kegiatan perlombaan di bidang olahraga.

Selanjutnya guru PJOK merupakan aktor yang paling penting dalam penerapan IKM Mapel PJOK. Guru PJOK memiliki peran dalam mengeksekusi IKM terhadap siswa, berhasil tidaknya penerapan IKM ini bergantung dari bagaimana guru PJOK dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Metode pengembangan pembelajaran yang diterapkan guru menjadi hal yang sangat krusial dalam mencapai pendidikan karakter. Guru PJOK selalu menjalankan segala tugas dan arahan yang diberikan oleh kepala sekolah, jika terkendala dalam proses pembelajaran maka guru akan menyampaikan kendala tersebut kepada kepala sekolah maupun kelompok belajar (kombel) yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Kombel ini dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para guru untuk membahas mengenai rancangan kurikulum merdeka, bertukar informasi dan ilmu, serta media diskusi saat guru mendapati kendala maupun permasalahan dalam menerapkan IKM. Selain itu guru Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah juga tergabung dalam kombel wilayah tengah, yang merupakan perkumpulan guru Mapel PJOK di Kecamatan Sokaraja bagian tengah. Kombel ini berada di bawah organisasi KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja.

Fleksibilitas organisasi di SDN 2 Sokaraja tengah dalam mengadaptasi IKM khususnya Mapel PJOK sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kepala sekolah dan guru yang cepat dalam mengadopsi kurikulum merdeka, karena memang masih muda sehingga dalam memanfaatkan teknologi sudah tidak kesulitan. Selain itu terdapat fasilitas pelatihan melalui bimtek, seminar dan *workshop* yang diadakan oleh KKG maupun Dinas Pendidikan sehingga memudahkan guru Mapel PJOK dalam mempelajari IKM. Memang guru sempat merasa terbebani dengan pengisian PMM yang waktu pengisiannya bebarengan dengan proses mengajar dan diintegrasikan dengan E-Kinerja, namun setelah tidak diwajibkan guru merasa beban administrasi lebih ringan. Selain itu, pada akhirnya guru juga merasakan manfaat setelah mengisi PMM yaitu mendapatkan sertifikat dari Direktorat Sekolah Dasar serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai IKM. Saat ini PMM menjadi media yang dapat dimanfaatkan oleh guru Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah untuk mencari referensi pengembangan pembelajaran, peningkatan kapasitas dan media belajar. Dengan demikian, hal-hal yang sebenarnya dikhawatirkan akan menjadi sebuah kendala pada pelaksanaan IKM Mapel PJOK, namun pada akhirnya justru memberikan manfaat yang lebih kepada guru. Artinya dalam proses mengadaptasi IKM, guru memang memerlukan ruang dan waktu agar dapat terbiasa dan menikmatinya.

Dalam pelaksanaannya kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang

bersifat *adaptif policy* mengingat salah satu prinsip utama Kurikulum Merdeka adalah fleksibel. Hal ini dapat dilihat dari proses implementasi Kurikulum Merdeka dalam aktivitas pembelajaran siswa yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Lingkungan internal meliputi karakteristik SDN 2 Sokaraja Tengah yang bisa dilihat dari Visi dan Misi, sumber daya yang mendukung, kebutuhan serta minat siswa. Pada lingkungan eksternal dilihat dari kondisi sosial dan budaya yang ada disekitar SDN 2 Sokaraja Tengah. Nantinya hasil dari proses pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka akan lebih variatif dan siswa benar-benar memiliki keterampilan serta kemampuan yang disesuaikan dengan minat, bakat serta latar belakang lingkungan sekolahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK, indikator karakteristik organisasi pelaksana sub aspek struktur organisasi telah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang telah terstruktur dengan baik sesuai regulasi yang ada dan garis kewenangannya telah implementasikan dengan baik. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Arif (2021), yang mana dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan lingkaran selatan tidak terdapat struktur organisasi pelaksana sebagai acuan tupoksi dari setiap instansi pelaksana, namun para pelaksana masih mengetahui tupoksi masing-masing. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis jauh lebih baik karena sub aspek struktur organisasi pelaksana telah terpenuhi dengan baik.

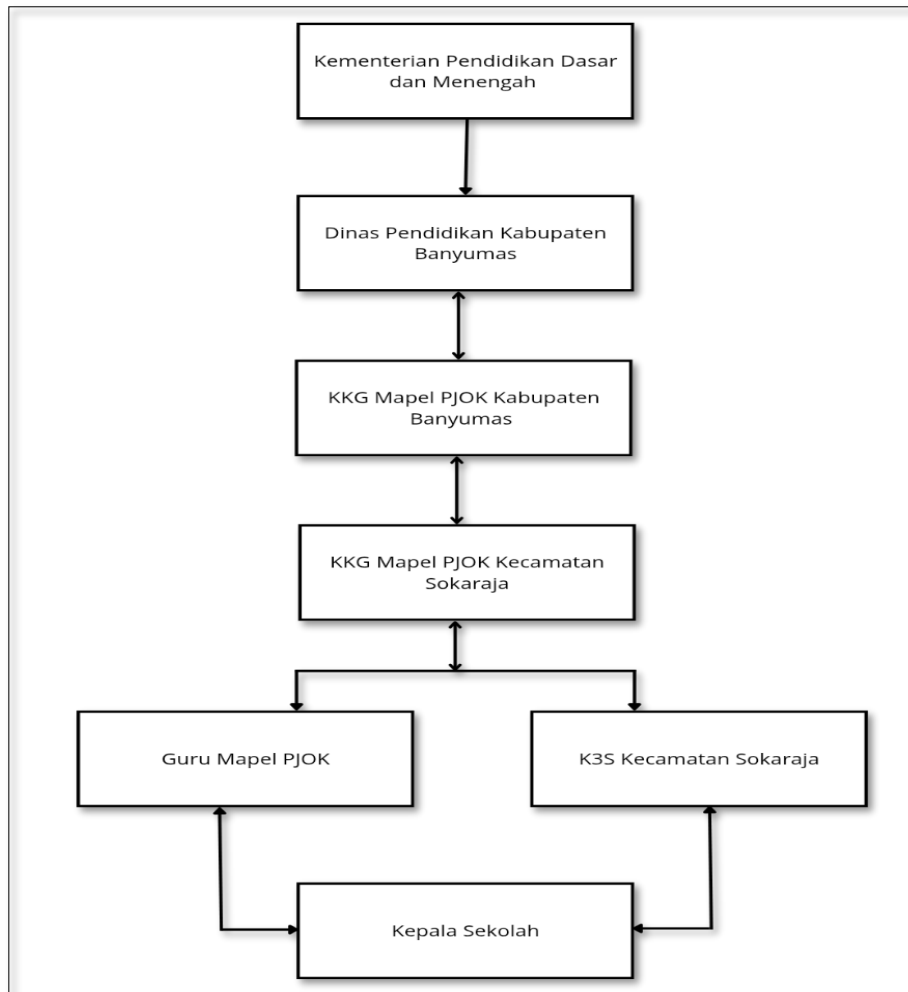
Pada sub aspek pola hubungan yang terjalin antar organisasi terkait juga telah terlaksana dengan baik dimana dari guru Mapel PJOK, kepala sekolah, kombel, KKG, dan Dinas Pendidikan saling menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Mereka saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih et al., (2022) berjudul "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar", yang mana setiap bagian telah menjalankan tugas dan perannya dengan baik mulai dari dinas pendidikan, kepala sekolah, guru dan staf. Kepala sekolah berupaya mendorong berbagai macam program partisipatif dan membangun kerjasama yang baik dengan para guru. Hasilnya kurikulum merdeka yang dirancang dan dilaksanakan dapat membentuk karakter siswa yang baik dan bernalar kritis. Kedua penelitian ini sama-sama telah menunjukkan hasil yang bagus karena pada sub aspek struktur organisasi dan pola-pola hubungan yang terjalin telah berhasil tercapai dengan baik.

Selanjutnya pada sub aspek fleksibilitas organisasi cukup baik, dimana guru mapel dan kepala sekolah mudah dalam mengadopsi IKM, meskipun sempat kewalahan dalam mengisi PMM namun pada akhirnya hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena dapat teratasi. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumitra (2023) dengan judul "Implementasi Kurikulum Belajar Mandiri Mapel PJOK di Sekolah dasar Kabupaten Beringin" yang mana guru sebagai implementator mampu beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan perangkat mengajar dengan baik. Kedua penelitian menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis ketercapaian sub aspek fleksibilitas organisasi hanya cukup baik, namun penelitian yang dilakukan oleh Sumitra (2023) menunjukkan ketercapaian sub aspek fleksibilitas organisasi yang lebih baik. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Sumitra (2023) menunjukkan hasil yang lebih baik daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila setiap implementator

memahami standar dan sasaran kebijakan, oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap kejelasan standar dan sasaran implementasi, baik dari ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana maupun konsistensi atau keseragaman dari standar dan sasaran yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi (Situmorang, 2016). Komunikasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik, karena jalannya suatu program tergantung dari bagaimana pola komunikasi yang terjadi antar aktor yang berperan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah alur komunikasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah:



Gambar 2. Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah

Sumber: Olah Data Penulis

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dipahami bahwa segala informasi mengenai IKM Mapel PJOK selalu disampaikan secara terstruktur dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kemudian ke KKG Mapel PJOK Kabupaten Banyumas, berlanjut ke KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja. Kemudian KKG Mapel PJOK menyampaikan kepada Guru Mapel PJOK melalui rapat atau pertemuan rutin, juga menyampaikan informasi kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Sokaraja melalui pertemuan. Selanjutnya informasi yang diterima oleh K3S Kecamatan Sokaraja akan disampaikan kepada setiap kepala sekolah melalui rapat. Setelah itu pihak guru mapel PJOK dan kepala sekolah dapat saling berkoordinasi dan menyampaikan informasi.

Kurikulum merdeka merupakan kebijakan yang fleksibel, sehingga proses komunikasi bersifat dua arah dimana setiap implementator dapat saling bekoordinasi dengan pihak berada di atasnya maupun dengan pihak yang berada di bawah kewenangannya. Dengan demikian hal tersebut mempermudah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka khususnya Mapel PJOK. Informasi yang disampaikan dari tingkat Kementerian hingga sampai ke guru Mapel PJOK dan kepala sekolah juga selalu konsisten disampaikan dan seragam, hanya yang membedakan adalah kemampuan dari setiap wilayahnya, jika memiliki keterbatasan sarana dan prasarana maka dapat melakukan inovasi pembelajaran asalkan sesuai konsep dasar materi.

Selama pelaksanaan IKM Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah tidak pernah ada kendala dalam proses komunikasi dan tidak terjadi miskomunikasi, hal ini terjadi karena segala informasi disampaikan secara terstruktur dengan baik. Dalam proses penyampaian informasi disampaikan secepat mungkin baik secara langsung dalam pertemuan rutin maupun melalui grup *Whats App*. Kemudian jika ada perubahan informasi biasanya hanya seputar pada jadwal pertemuan, bimbingan teknis, maupun seminar. Selain itu, informasi mengenai IKM juga dapat diakses oleh guru secara *online* melalui PMM yang mana memuat berbagai informasi seputar IKM yang dibutuhkan oleh guru.

Hasil penelitian menunjukkan dalam proses kegiatan pembelajaran Mapel PJOK guru selalu menyampaikan materi yang akan dipelajari diawal pembelajaran setelah itu baru memberikan contoh dan siswa mempraktikan. Siswa juga merasa bahwa selama mengajar guru telah menyampaikan materi dengan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Pada akhir pembelajaran guru juga melakukan evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa secara langsung ataupun melalui *post test*. Selain itu guru juga menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, hal ini dilakukan dengan tujuan siswa dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran PJOK selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka indikator komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan proses penyampaian informasi yang sudah dilakukan secara konsisten, seragam, dan terstruktur dari tingkat pusat hingga sampai ke guru Mapel PJOK. Informasi yang disampaikan juga sudah jelas, hal ini terjadi karena proses komunikasi yang terjadi bersifat dua arah sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Selain itu dalam proses pembelajaran guru juga telah menyampaikan materi secara konsisten dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih et al., (2022) yang mana kepala sekolah berupaya menjalin komunikasi yang baik dalam melaksanakan IKM dengan membangun keharmonisan dan kekompakan kepada seluruh SDM baik internal maupun eksternal. Dengan demikian proses pelaksanaan IKM akan berjalan dengan lancar. Kedua penelitian menunjukkan hasil yang sama-sama bagus dengan menunjukkan ketercapaian pada indikator komunikasi antar organisasi terkait.

Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana diartikan sebagai tanggapan atau persepsi dari para implementator terhadap suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) berpandangan bahwa, terdapat tiga unsur respon pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu (Situmorang, 2016):

1. Pemahaman tentang kebijakan

Pemahaman pelaksana tentang standar dan tujuan dari kebijakan merupakan hal yang penting, karena implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran pelaksana secara menyeluruh terhadap suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah guru mapel telah memahami dengan baik bagaimana standar pelaksanaan dan tujuan IKM. Guru Mapel PJOK memiliki pandangan bahwa IKM menjadikan siswa lebih aktif berpikir, guru hanya sebagai fasilitator saja, memberikan kebebasan berpikir kepada siswa namun tidak keluar dari konsep, dan mengedepankan pendidikan karakter. Selanjutnya, kepala sekolah juga berpendapat bahwa, IKM berfokus pada materi esensial untuk mengatasi masalah *learning loss* yang dialami oleh siswa di Indonesia selama pandemi Covid-19. Kemudian IKM juga memiliki fleksibilitas, sehingga proses pembelajaran lebih mudah untuk dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Sebagai contoh di SDN 2 Sokaraja Tengah terdapat siswa yang berkebutuhan khusus, maka guru dapat menentukan cara pemberian materi dan nilai KKM dengan mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja menjelaskan bahwa IKM ini diluncurkan pada masa pandemi maka para guru saat itu dituntut untuk menguasai IT karena pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi secara daring melalui HP. Dengan kondisi yang sudah normal saat ini IKM masih tepat diterapkan, terutama pada saat guru berhalangan mengajar maka dapat memberikan materi pembelajaran melalui video yang dikirimkan ke grup Whats App wali murid, kemudian siswa dapat belajar dari rumah dan mempraktikannya. Selanjutnya IKM juga memiliki tujuan mengedepankan pendidikan karakter yang memang kondisi saat ini siswa sedang mengalami degradasi moral. Banyak siswa yang tidak memiliki perilaku yang baik, melalui pendidikan karakter siswa dilatih untuk bisa lebih peduli dan memiliki empati yang tinggi. Sebagai contoh dengan mempelajari bagaimana pola hidup sehat dan bersih, maka siswa didorong rasa kepeduliannya untuk bisa menjaga lingkungan dan kebersihan diri dengan minimal sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Arif (2021), yang mana pada sub aspek pemahaman tentang kebijakan telah tercapai dengan baik. Hal ini dilihat dari para pelaksana kebijakan yang telah memahami kebijakan dengan baik, dari segi tugas, fungsi dan pemahaman tentang tujuan dari pembangunan jalan lingkar selatan. Adanya pemahaman tentang kebijakan membuat para pelaksana dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Dengan demikian kedua penelitian sama-sama menunjukkan hasil yang baik karena pada sub aspek pemahaman tentang kebijakan telah tercapai dengan baik.

2. Tanggapan kebijakan

Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan dapat dikategorikan kedalam bentuk penerimaan, netralitas, dan penolakan (Situmorang, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, tanggapan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah, masing-masing implementator merasa IKM ini sebagai kurikulum yang bagus. Hal ini karena IKM memiliki arahan, visi dan misi yang jelas, serta ada target yang harus dicapai yaitu pendidikan karakter. Menurut guru Mapel PJOK, IKM ini memberikan kebebasan terhadap siswa untuk membentuk pola pikirnya sendiri, sebagai contoh ketika siswa harus memperoleh angka dari 1-10 maka mereka dapat menggunakan cara yang berbeda-beda tidak harus sama

dengan yang dicontohkan oleh gurunya. Selanjutnya guru Mapel PJOK juga berpendapat bahwa tidak ada kurikulum yang tidak bagus, hanya saja memang dalam penerapan IKM ini memerlukan adaptasi yang membutuhkan ruang dan waktu. Kemudian kepala sekolah juga merasa bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan arahan, visi dan misi yang jelas dimana pembelajaran siswa ditujukan untuk pembentukan karakter. Pihak KKG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja menyampaikan bahwa mereka merasa antusias karena IKM menuntut guru untuk menguasai *Information Technology* (IT), yang mana pada awalnya mereka seolah-olah acuh karena fokus dengan pembelajaran yang selalu dilakukan di lapangan dan tiba-tiba harus mau belajar dan menggunakan perangkat elektronik. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka respon para pelaksana IKM Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah termasuk dalam kategori penerimaan, hal ini dibuktikan dengan respon positif yang mereka berikan terhadap IKM Mapel PJOK.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2024) dengan judul penelitian "*Implementation of the Kurikulum Merdeka in Physical Education*", yang mana guru Mapel PJOK dan Waka Kurikulum memiliki pandangan yang positif terhadap fleksibilitas dan inovasi yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka. Hal dapat menjadi solusi dari keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah sehingga tidak menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan proses pembelajaran Mapel PJOK. Dengan demikian kedua penelitian sama-sama menunjukkan hasil yang baik, karena pada sub aspek tanggapan kebijakan telah tercapai dengan baik.

3. Intensitas tanggapan.

Intensitas tanggapan diartikan sebagai tingkat respon pelaksana terhadap kebijakan yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bentuk melaksanakan kebijakan publik. Intensitas tanggapan dalam penelitian implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah dimaksudkan sebagai komitmen dari para pelaksana dalam menjalankan IKM Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana sudah berkomitmen sejak awal untuk melaksanakan IKM sebaik mungkin sesuai dengan arahan pemerintah dan regulasi yang berlaku. Pihak KKG Kecamatan Sokaraja terus berupaya menjalankan segala arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maupun dari pemerintah pusat. Guru Mapel PJOK akan terus memberikan kebebasan berpendapat kepada siswa dan mengedepankan pendidikan karakter. Kepala sekolah akan terus membimbing dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada guru Mapel PJOK dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 2 Sokaraja Tengah. Komitmen dari para guru di SDN 2 Sokaraja Tengah dalam melaksanakan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK dapat dibuktikan pada tahun 2021 yang mana mereka mendapat BOS Kinerja sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat karena telah mengantarkan siswanya mengikuti kejuaraan silat hingga tingkat nasional. Nilai dari BOS Kinerja tersebut mencapai sekitar 20 Juta yang mana dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler salah satunya silat dan mengadakan *In House Training* (IHT). IHT merupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tenaga pendidik. Selain itu pihak sekolah juga melakukan kolaborasi dengan sekolah swasta untuk berbagi pengalaman dan ilmu karena telah berhasil mengantarkan siswanya menuju kejuaraan tingkat nasional.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Arif (2021), yang mana pada sub aspek intensitas tanggapan kebijakan telah tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dari para pelaksana yang rela

bekerja lembur agar pembangunan jalan lingkaran selatan dapat segera selesai dan manfaatnya dapat segera dirasakan. Dengan demikian kedua penelitian sama-sama menunjukkan hasil yang baik, karena pada sub aspek intensitas tanggapan kebijakan telah tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah tercapai dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pemahaman yang baik dari para pelaksana mengenai IKM, merespon positif, dan berkomitmen untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka khususnya Mapel PJOK. Selanjutnya bukti dari komitmen para pelaksana dapat dilihat dari apresiasi bantuan BOS Kinerja yang telah mereka terima pada tahun 2021 karena telah mengantarkan siswanya mencapai kejuaraan silat tingkat nasional. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kugara (2025) di negara Zimbabwe, yang mana guru mengakui pentingnya pendidikan jasmani di sekolah dasar, namun persaingan dengan mata pelajaran akademik lainnya membuat beberapa program pendidikan jasmani dikurangi atau dibatalkan. Akibatnya guru perlu berkomitmen lebih untuk bekerja sama dan berbagi informasi tentang peningkatan dan penguatan penyampaian program pendidikan jasmani di sekolah dasar. Kedua hasil penelitian menunjukkan adanya respon positif akan pelaksanaan sebuah kurikulum dalam pendidikan jasmani di sekolah dasar, namun penelitian yang dilakukan oleh Kugara (2025) belum menunjukkan kesetaraan tanggapan positif terhadap kurikulum pendidikan jasmani bagi seluruh guru. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil yang lebih baik karena ketercapaian penuh terhadap indikator sikap para pelaksana kebijakan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn indikator terakhir yang perlu diperhatikan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana faktor lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan (Fauziyah & Arif, 2021). Lingkungan eksternal dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah meliputi:

1. Lingkungan Sosial

Dalam penelitian ini lingkungan sosial yang dimaksudkan adalah dukungan masyarakat yang merupakan wali murid dari siswa di SDN 2 Sokaraja Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan sosial wali murid berpengaruh terhadap pelaksanaan IKM pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Dengan adanya pemahaman wali murid mengenai IKM maka guru menjadi lebih mudah dan semangat untuk melaksanakan IKM. Sebagai contoh saat pembelajaran dilakukan secara daring karena guru berhalangan mengajar atau terdapat kegiatan di sekolah yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan, maka guru akan memberikan materi pembelajaran melalui video yang dikirimkan di grup Whats App wali murid di rumah tentunya akan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran dan membantu anaknya mengerjakan tugas seperti membuat video praktik aktivitas kebugaran jasmani.

Selain itu terdapat bentuk dukungan sosial lain dari wali murid berupa infak yang rutin dilaksanakan dari hari Senin sampai Jum'at. Dimana pendapatan infak dari hari Senin sampai Rabu untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tentunya untuk mendukung aktivitas pembelajaran, termasuk Mapel PJOK. Sementara pendapatan infak di hari Kamis ditujukan kepada Paguyuban Wali Murid dan pendapatan infak hari Jum'at untuk kegiatan qurban. Berdasarkan informasi dari

informan DRW, kegiatan infak tidak termasuk pungutan liar, hal ini dikarenakan bersifat sukarela dan pihak sekolah tidak mematok besaran infak yang harus diberikan wali murid. Selain itu pengelolaan infak juga dilakukan dengan baik, dimana dalam pertemuan dengan wali murid setiap pendapatan dan pengeluaran akan disampaikan secara terbuka. Selama ini juga tidak pernah ada tuntutan keberatan dari wali murid, justru para wali murid merasa senang karena telah memberikan sumbangsih sebagai alumni terhadap sekolahnya dulu yang sekarang menjadi sekolah anak mereka. Salah satu bentuk pemanfaatan dana infak dalam Mapel PJOK adalah pembangunan sanggar yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran materi silat dan ekstrakurikuler silat maupun karate.

2. Lingkungan Ekonomi

Aspek lingkungan ekonomi dalam penelitian ini adalah pengaruh kondisi ekonomi wali murid terhadap motivasi belajar siswa di sekolah khususnya pada Mapel PJOK. Berdasarkan hasil penelitian kondisi ekonomi wali murid di SDN 2 Sokaraja Tengah rata-rata dalam kondisi mampu, namun tidak berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Berdasarkan informasi dari empat orang perwakilan siswa kelas 5, bahwa orang tua saat mengetahui anaknya mendapatkan nilai bagus khususnya di mapel PJOK tidak memberikan apresiasi berupa pemberian hadiah, namun orang tua tetap merasa senang dan bangga atas pencapaian anaknya. Adanya kondisi ini tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan motivasi belajar siswa di sekolah, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Mapel PJOK karena memang merasa menyenangkan.

3. Lingkungan Politik

Faktor lingkungan politik dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan dan dukungan dari pemerintah yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, adanya perubahan kebijakan sewaktu-waktu terutama isu mengenai penggantian kurikulum baru, tentunya mempengaruhi proses penerapan IKM Mapel PJOK. Hal ini karena pasti IKM tidak digunakan lagi, kemudian guru dan siswa tentunya perlu melakukan adaptasi lagi. Namun jika ada kebijakan baru lagi mengenai perubahan kurikulum maka baik guru Mapel PJOK, Kepala Sekolah, dan KKG Mapel PJOK siap melaksanakan karena mereka sudah belajar dari pengalaman sebelumnya dan memang tuntutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa guru harus dinamis dan bisa menyesuaikan dengan perubahan.

Kemudian dari segi dukungan pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sendiri telah memberikan berbagai fasilitas seperti mengadakan seminar, bimbingan teknis, *workshop*, dan pertemuan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas guru Mapel PJOK dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya pihak dinas juga melakukan pengadaan buku panduan mengajar atau modul ajar membantu guru dalam proses mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga memberikan fasilitas berupa pendatangan instruktur silat ke SDN 2 Sokaraja Tengah untuk mendukung pembelajaran Mapel PJOK dan Ekstrakurikuler Silat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan eksternal seperti dukungan sosial wali murid berpengaruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Sementara pada faktor ekonomi wali murid tidak berpengaruh, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya apresiasi dari orang tua berupa pemberian hadiah kepada siswa saat mendapat nilai bagus pada Mapel PJOK, namun siswa tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Mapel PJOK. Hasil Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan

oleh Bramantha & Yulianto (2020), yang mana kondisi ekonomi orang tua siswa di SDN 3 Mangaran Kabupaten Situbondo berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sebesar 59,7% sedangkan 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Kedua penelitian menunjukkan hasil yang bagus, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih baik karena kondisi faktor ekonomi wali murid tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi siswa di SDN 2 Sokaraja Tengah dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Dalam konteks ini, jika ada siswa dengan kondisi ekonomi orang tua kurang mampu maka tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap motivasi belajar siswa.

Kemudian faktor politik berupa perubahan kebijakan serta dukungan pemerintah berpengaruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Febrianta (2024), dengan judul “Keterlaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang Pada Kurikulum Merdeka”. Dimana adanya kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah, membantu guru PJOK dalam memahami Kurikulum Merdeka dan mempermudah dalam proses perencanaan maupun pengembangan pembelajaran Mapel PJOK. Kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan hasil yang bagus, karena sub aspek penelitiannya telah tercapai dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan, dalam indikator ini telah tercapai dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan penyusunan KOSP Mapel PJOK yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dan jangkauan terhadap siswa pada tahun 2024 seluruhnya sudah tercapai. Tujuan dari IKM untuk membantuk karakter pada siswa juga telah diwujudkan pada aktivitas pembelajaran Mapel PJOK melalui variasi permainan yang melatih kejujuran, kedisiplinan, kolaborasi, kepedulian, dan rasa tanggungjawab.
2. Sumber daya, pada sub aspek sumber daya manusia telah terpenuhi dengan baik hal ini dibuktikan dengan jumlah guru mapel yang sudah cukup sesuai dengan kebutuhan, memiliki kompetensi yang sesuai, memiliki sertifikasi keguruan, mampu memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dengan baik, dan telah mengikuti berbagai seminar, bimtek, maupun workshop untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar dan menerapkan IKM. Pada sub aspek anggaran telah mendukung meskipun belum sepenuhnya karena keterbatasan dana BOS yang digunakan untuk seluruh operasional sekolah, namun pihak sekolah tetap mengupayakan agar bisa sepenuhnya mendukung dengan cara melakukan perbaikan fasilitas secara bertahap.
3. Karakteristik organisasi pelaksana. Indikator ini pada implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK telah tercapai, hal ini dapat dilihat pada sub aspek organisasi yang telah terstruktur dengan baik sesuai regulasi yang ada dan garis kewenangannya yang bersifat top down telah implementasikan dengan baik. Pada sub aspek pola hubungan yang terjali antar organisasi terkait juga telah terlaksana dengan baik dimana dari guru Mapel PJOK, kepala sekolah, kombel, KKG, dan Dinas Pendidikan saling menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Mereka saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK. Selanjutnya pada sub aspek fleksibilitas organisasi tercapai cukup baik, dimana guru mapel dan kepala sekolah mudah dalam mengadopsi IKM,

meskipun sempat kewalahan dalam mengisi PMM namun pada akhirnya hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena dapat teratasi. Dalam proses pelaksanaannya kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan adaptif policy yang mana disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Indikator ini dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan proses penyampaian informasi yang sudah dilakukan secara konsisten, seragam, dan terstruktur dari tingkat pusat hingga sampai ke guru Mapel PJOK. Proses komunikasi bersifat dua arah, sehingga informasi yang disampaikan juga sudah jelas dan tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu dalam proses pembelajaran guru juga telah menyampaikan materi secara konsisten dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa.
5. Sikap para pelaksana, indikator ini dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah telah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemahaman yang baik dari para pelaksana mengenai IKM, berespon positif, dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka khususnya Mapel PJOK. Selanjutnya bukti dari komitmen para pelaksana dapat dilihat dari apresiasi bantuan BOS Kinerja yang telah mereka terima pada tahun 2021 karena telah mengantarkan siswanya mencapai kejuaraan silat tingkat nasional.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor lingkungan eksternal seperti dukungan sosial wali murid dan faktor politik berupa perubahan kebijakan serta dukungan pemerintah berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Sementara pada faktor ekonomi wali murid tidak memberikan pengaruh, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya apresiasi dari orang tua berupa pemberian hadiah kepada siswa saat mendapat nilai bagus pada Mapel PJOK, namun siswa tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Mapel PJOK.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dalam proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di tingkat sekolah dasar pemerintah dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran BOS yang lebih memadai, sehingga satuan pendidikan dasar mampu mengadakan pembelian ataupun perbaikan fasilitas penunjang aktivitas pembelajaran. Meskipun Kebijakan Kurikulum Merdeka memiliki fleksibilitas, namun pemerintah tetap perlu mempertimbangkan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia di setiap satuan pendidikan dasar agar tujuan dari implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (4th ed.). Penerbit Gava Media.
- Mulyasa. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka* (A. Ulinuha, Ed.). PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=ec_hEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (W. Triono & J. E. Sianturi, Eds.; Pertama). SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI). <https://id.z-lib.gs/book/26710379/3280c8/kebijakan-publik-teori>

analisis-implementasi-dan-evaluasi-kebijakan.html

- Soekowaty, A. Mth., & Gie, T. L. (2013). *Filsafat Administrasi* (N. Hikmah, Ed.; 2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Tachjan, T. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.; 1st ed.). AIPI. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

Artikel dan Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1). <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 04, 173–199. <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a4>
- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. 1(2), 48–58. <https://media.neliti.com/media/publications/226468-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf>
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>
- Bramantha, H. & Yulianto, D. E. (2020). Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar. 3 (1), 46–55. <https://doi.org/10.15575/al-aulad.v3i1.5851>
- Bratten, J. H., & Kilanowska, J. (2021). Physical education and new forms of activity following the implementation of the core curriculum in Norway in 2020. *Journal of Education, Health and Sport*, 11(12), 56–68. <https://doi.org/10.12775/jehs.2021.11.12.005>
- Donkor, S. K., & Domfeh, C. (2024). Classroom Practices of Basic School Teachers in the Implementation of the Standards-Based Physical Education Curriculum in Public Basic Schools in the Effutu Municipality, Ghana. *Creative Education*, 15(12), 2432–2454. <https://doi.org/10.4236/ce.2024.1512148>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JiIP*, 7(7), 7094–7100. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Jurnal Dialog*, 7(1). <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Firdaus, I. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <https://eprints.untirta.ac.id/1438/>
- Hidayat, C., Ichsan, A. N., Wahidah, I., Listyasari, E., Rohyana, A., Afif, U. M., & Rahmat, A. A. (2024). Implementation of the Kurikulum Merdeka in Physical Education Learning. *Sport-Mu: Jurnal Pendidikan Olahraga*, 5(1), 31–44. <https://doi.org/10.32528/sport-mu.v5i1.22915>
- Juditya, S., Hardi, V. J., Widaningsih, S., Gunawan, G., & Pristiawati, A. (2022). Sosialisasi dan Implementasi: Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran PJOK di Kabupaten Cianjur. *Publikan Journals: Jurnal Publikasi Pendidikan*, 12(3), 279–284. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/>
- Kugara, S. (2025). Challenges In The Implementation of The New Curriculum In Physical Education and Sport: A Case Study Of Mhondoro Rural District, Mashonaland West Province In Zimbabwe. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(2), 2835–2844. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0225.0935>
- Liu, C., Dong, C., Li, X., Huang, H., & Wang, Q. (2023). Analysis of Physical Education Classroom Teaching after Implementation of the Chinese Health Physical Education Curriculum Model: A Video-Based Assessment. *Behavioral Sciences*, 13(3).

<https://doi.org/10.3390/bs13030251>

- Majo, D. N. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kalurahan Pengkok Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta) [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/2804/>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(5), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Mulyadi, M., Hidayatullah, M. F., Syaifullah, R., & Riyadi, S. (2024). Evaluative Study of the Implementation of the Independent Curriculum in Physical Education Elementary School Level Using the CIPP Model. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(2), 1017–1030. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.5718>
- Putri, N. A., & Rezania, V. (2023). Analisis Perbandingan Hasil Belajar pada Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kecamatan Tulangan. *Jurnal Papeda*, 5(2), 179–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v5i2.4031>
- Saputri, H. A., Bella S., Zulhijrah, Z. & Prastowo A., (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Perpektif Guru sekolah Dasar. *Al-Madrasah*, 8(2), 861-872. <http://dx.doi.org/10.35931/am.v8i2.3468>
- Sari, F. I., Sunendar, D., & Anshori, D. (2023). Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka (Vol. 5). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10843>
- Setiawan, D., & Febrianta, Y. (2024). Keterlaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang pada Kurikulum Merdeka. *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 57–65. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/251>
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jtp.v1i1.27>
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248–8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Sumitra, D. A. (2023). Implementasi Kurikulum Belajar Mandiri Mata Pelajaran PJOK di Sekolah Dasar Kabupaten Beringin. *Sibatik Journal*, 2(7), 2085–2090. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1115>
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 9–16. https://www.researchgate.net/publication/354430318_PERGESERAN_DALAM_PARADIGMA_ILMU_ADMINISTRASI_PUBLIK
- Sutikno, C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *MIDA: Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 10(10), 1–6. <https://scholar.archive.org/work/oifzjvifbvahpbt6ty5w72nbrm/access/wayback/https://e-journal.unwiku.ac.id/isip/index.php/DA/article/download/24/25>
- Wijayanti, I. D., & Ekantini, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran IPAS MI/SD. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 2100–2122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp/v8i2.9597>

Referensi Pendukung

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Kurikulum Merdeka. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>
- Kemendikbud. (2020). Mendikbud jelaskan Soal Kurikulum Darurat. <https://gtkdikmendikus.kemendikbud.go.id/mendikbud-jelaskan-soal-kurikulum-darurat/>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Peta Sebaran Pelaksana IKM. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/pelaksana-ikm>
- Mashabi, S., & Kasih, A. P. (2024). Kemendikbud: 73 Persen Sekolah Sudah Gunakan Kurikulum Merdeka. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/13/134803371/kemendikbud-73-persen-sekolah-sudah-gunakan-kurikulum-merdeka>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137717/permendikbud-no-6-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://guru.kemdikbud.go.id/dokumen/pyl6pXP6wA?parentCategory=Implementasi%20Kurikulum%20Merdeka>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224157/permendikbudriset-no-2-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224179/permendikbudriset-no-7-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224238/permendikbudriset-no-16-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945